



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN

NOMOR: 487.22/243 /2018

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Grobogan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU wajib dirujuk oleh setiap Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Grobogan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Juli 2013

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR : 487.22/343/2018
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
DI LINOKUP PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENEGUALLAN	KONSEKUENSI	
				APABILA DIBUKA	MANFAAT APABILA DITUTUP
UMUM					
1	Surat Rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas, kecuali atas perusaan Komisi informasi/pengadilan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan
2	Penetapan Keputusan Bupati yang bersifat rahasia	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mendukung kebijakan pemerintah/pimpinan
3	Telaah Staf untuk saran/kejadian draf kebijakan Bupati	- Pasal 6 ayat (3), Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Tidak terbatas	Dapat menimbulkan berbagai spekulasi dan kegaduhan yang tidak perlu pada hal naskah/draft masih dalam proses/pembahasan	Kelancaran proses dan tahapan penyusunan kebijakan
4	Memorandum/surat-surat antar dan inter badan publik	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
5	Perjanjian kerjasama daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Setelah perjanjian kerjasama disepakati dan ditandatangani	Menghambat kebijakan pemerintah daerah	Memperlancar proses dan kebijakan pemerintah
6	Disposisi surat pimpinan	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Selama belum ada undaklanjur dari OPD pengulah surat	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
7	Rencana pelaksanaan tukar menukar/pemindahan tangan barang daerah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi ketertiban pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum

8) Proses dan hasil musrenbang RKPD kabupaten di kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
9) Proses dan hasil forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

10	Data usulan perencanaan pembangunan dari pokok pidutan DPRD untuk RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Permenologi No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan
11	Proses musrenbang RKPD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Permenologi No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparatur pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

12	Hasil musrenbang RKPD kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i (w, j) 	sampai dengan ditetapkannya produk hukum Perkada RKPD	Menyimpulkan proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu pada ketentuan perundangan
13	Proses dan hasil tahapan pembahasan KUA PPAS	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Sampai dengan telah diverifikasi oleh aparat pemeriksa/pengawasan/auditor (BPKP/BPK)	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
14	File data spasial rencana tata ruang untuk pola ruang, struktur ruang dan/atau kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - UU No. 4 Tahun 2011 Informasi Geospasial - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j 	Tidak terbatas	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan

15	Proses tahapan penyusunan rencana tata ruang	- UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	sampai dengan ditetapkannya produk hukum rencana tata ruang	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan dengan tetap mengacu ketentuan perundangan
16	Besaran harga hasil penilaian lembaga independen/appraisal untuk pengadaan tanah	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang karsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum
17	Dokumen karya intelektual oleh Lembaga/swasta/kelompok/perseorangan	- UU NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b dan j	Sampai ada persetujuan dari orang yang bersangkutan/pihak yang berwenang	Berpotensi memunculkan persaingan tidak sehat, berpotensi pelanggaran hukum/pembajakan	Menjamin lingkungan kegiatan bisnis yang sehat, menjauhi pemiliknya memperoleh manfaat ekonomi
18	Kajian pemerintah pusat dan Berita Acara Pelepasan tanah kas desa	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang karsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum
19	Kajian teknis penetapan lokasi dan pengadaan tanah untuk kepentingan umum/non kepentingan umum	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang karsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf e dan i	Setelah proses selesai	Berpotensi keterlibatan pihak spekulan sehingga merugikan daerah	Menutup peluang kerugian yang ditimbulkan oleh spekulan dan orientasi kepentingan umum
PEMERINTAHAN					
20	Surat pengaduan masyarakat	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang karsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1)Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2)Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

21	Keputusan alat-alat kelengkapan DPRD yang dihasilkan melalui rapat yang bersifat tertutup	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1)Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2)Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
22	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ke Kemendagri	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	Mendaului keputusan yang diambil oleh lembaga yang memiliki kewenangan (tidak taat asas)	Sesuai dengan prosedur yang seharusnya berjalan (taat asas)

23	Berkas perkara PTUN dan perkara perdata sebelum disampaikan di persidangan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009, Pasal 70 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memperlancar proses hukum hukum/penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
24	Soal ujian tertulis perangkat desa dan ujian tertulis bakti calon Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j Juklak, Juknis 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
25	Proses pengusulan pengesahan pemberhentian Kepala Desa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
26	Identitas tersangka dan korban kasus narkoba untuk kegiatan penyelidikan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, b dan i	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memperlancar proses hukum hukum/penyelidikan/ penyidikan, (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

27	Rancangan keputusan bupati pada saat proses bantuan hukum	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat mengikuti proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
28	Dokumen dan informasi perkara yang sedang ditangani oleh PPNS	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
29	Dokumen proses penyelesaian sengketa/konflik lingkungan	- UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
30	Informasi data pribadi penegak perda	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
31	Berita Acara Pemeriksaan	UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/ penyidikan, dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

32	Dokumen Kependudukan yang meliputi : <ol style="list-style-type: none"> 1. Biodata penduduk 2. KK 3. KTP 4. Surat Keterangan Kependudukan 5. Akta Pencatatan Sipil 6. Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian dan akta pengakuan anak 	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 79 dan 84 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Bab VII Bagian Kedua Pasal 58 dan 59 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	<ul style="list-style-type: none"> - Bertentangan dengan hak pribadi/privasi yang berpotensi disalahgunakan - Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia 	<ul style="list-style-type: none"> - Melindungi penyalahgunaan data/informasi - Menjaga privasi seseorang yang menjadi hak asasi masing-masing individu/pribadi
33	Penunjukan petugas pembuatan naskah ujian dan dokumen naskah ujian perangkat desa	<ul style="list-style-type: none"> - Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengikuti proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
	POLITIK				
34	Arsip daftar orang yang masuk G30 S/PKI dan organisasi terlarang lainnya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kebersihan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Mengungkap rahasia pribadi dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melindungi data pribadi dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

35	Proses Usulan Keputusan Gubernur tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkalan Anggota/Pimpinan DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Hurufi 	Tidak terbatas	Dapat menggunakan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
36	Proses Usulan Penetapan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota - Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Grobogan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Hurufi 	Tidak terbatas	Dapat menggunakan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat

37	Data kegiatan intelejen terkait dengan ideologi, politik, sosial budaya dan keamanan serta penanganan kasus yang mengganggu masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c, i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga pertahanan dan keamanan negara dan/atau daerah/wilayah (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM					
38	Peta Lokasi Penyimpanan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
39	Identitas korban yang dirujuk di Pusat Pelayanan Terpadu BP3AKB Provinsi Jateng	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h 	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi rahasia pribadi seseorang
40	Informasi perkara pelanggaran perda yang sedang ditangani PPNS	<ul style="list-style-type: none"> - Kep Menterium No.1 Tahun 2003 tentang Pencabutan Permenagri No. 4 Tahun 2007 tentang PPNS di lingkungan Pemda - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

41	Rencana penertiban/penindakan dan penegakan pada obyek tertentu	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
42	Informasi hasil penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran perda	- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - PP 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, i dan j	Tidak terbatas	(1) Dapat menghambat proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (3) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Memperlancar proses hukum/penyelidikan/penyidikan, dan (2) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (3) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
KESEJAHTERAAN RAKYAT					
43	Naskah soal UN/UNBK/UNPK/UASBM, dll	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - Permendikbud, Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional	Tidak terbatas, kecuali untuk ujian berbasis kertas dan tidak ada perintah pembakaran/pemusnahan	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
44	Proses scanning/scoring UN/UNBK/UNPK/UASBM	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - Permendikbud, Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional	Tidak terbatas	(1) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

45	Dokumen rekam medis termasuk nomor registrasi rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
46	Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
47	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dokter dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	<ul style="list-style-type: none"> - Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 Pasal 18 ayat (1) - UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
48	Hasil audit medik pada sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Kemenkes No.496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap 	Menjaga akuntabilitas sarana kesehatan
49	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i 	Sampai dengan pengumuman juara lomba	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
50	Proses penentuan penerima bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i 	Sampai ada penetapan	Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan	Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat
51	Hasil diagnosis/bedah kasus (penyandang HIV/AIDS dan eks WTS)	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan i 	Tidak terbatas	<ul style="list-style-type: none"> (1) Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang dan (2) Dapat merugikan proses penyusunan kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Melindungi rahasia pribadi seseorang dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap

52	Identitas korban tindak kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 huruf c - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
53	Data hutang pasien kepada Rumah Sakit	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
54	Data Penderita HIV/AIDS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin yang bersangkutan	Potensi menimbulkan kerawanan/kekhawatiran masyarakat	sebagai analisis kebijakan daerah
PEREKONOMIAN					
55	Surat Perijinan/ijin usaha beserta dokumennya	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b dan j 	Tidak terbatas, sampai dikeluarkannya ijin usaha, selama ijin masih dipergunakan	Mengungkapkan data pribadi pemegang ijin	Menjaga privasi dari pemegang ijin
56	Data kekayaan alam	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf d dan j 	Tidak terbatas, kecuali mendapatkan ijin dari Pemerintah Daerah	Dapat mengungkapkan kekayaan alam yang berpotensi disalahgunakan	Mempermudah pengelolaan dan pengaturan sumber daya alam
57	Kajian pemerintah pusat dan Berita Acara Pelepasan tanah aset pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Sampai proses selesai	Berpotensi munculnya spekulasi yang bermaksud mengambil keuntungan	Lebih mengutamakan optimalisasi untuk kepentingan pembangunan
58	Berita sandi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 	Selama berita masih bersifat rahasia	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
59	Spesifikasi sarana komunikasi sandi	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
60	Perangkat khusus persandian	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6 	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara

61	Kunci sistem sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
62	Penempatan jaringan, peralatan sandi dan tempat kegiatan sandi	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
63	Jalur komunikasi VIP	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
64	Frekuensi radio komunikasi persandian	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
65	Berita/Radiogram rahasia	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf c angka 6	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi pertahanan dan keamanan negara
66	Data teknis potensi air tanah	- PP No. 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah Pasal 23 ayat (3) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf d, i, j	Selama potensi air tanah diperkirakan masih ada	Dapat mengungkapkan kekayaan alam	Mempermudah pengaturan dan pengelolaan SDA
67	Surat pengajuan Hak Merek, Cipta, Paten dan Desain yang masih dalam proses Kemenkumham	- UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten - UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek - UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf b	Sampai selesaiya proses pengajuan	Potensi untuk ditiru secara melawan hukum	Menjaga dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain
68	Lokasi server	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j	Selama masih digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

69	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
70	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
71	Sistem Keamanan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j 	Selama masih difungsikan/digunakan	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
72	Kode Akses Elektronik dan user akses/password	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
73	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b, i dan j 	Selama masih digunakan/berlaku	Dapat mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
74	Daftar nama individu/pribadi administrator (admin) media sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 6 ayat (3) Huruf c UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h 	Tidak terbatas, kecuali ada ijin dari pribadi yang bersangkutan	<p>Dapat mendorong serangan kepada individu-individu petugas admin media sosial</p>	Menjaga kelancaran pelaksanaan tugas para admin secara profesional
75	Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,i,j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin para pihak dan pihak yang berwenang	Bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan	Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan dan etika pengadaan

76	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (RPS)	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang - Pasal 6 ayat 3 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,j 	Sampai diketahui pemenangnya	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa	Memperlancar proses penyusunan kebijakan dibidang pengadaan barang/jasa
77	Dokumen penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 6 ayat 3 Huruf b UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin para pihak dan pihak yang berwenang	Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan	Dapat menjamin obyektivitas penilaian/evaluasi penawaran
78	Susunan kepanitiaan pengadaan barang/jasa melalui LPSE	<ul style="list-style-type: none"> - Perpres RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,j 	Selama proses pengadaan barang/jasa	Dapat terjadi harga lelang tidak sesuai yang diharapkan	Menghindari konflik kepentingan menjaga persaingan lelang yang sehat melindungi kerahasiaan dokumen
79	Proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan peredaran pupuk dan peredaran pestisida	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a,b,i dan j 	Sampai selesai proses penyelidikan dan penyidikan	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	Memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan
80	Proses penetapan penerimaan bantuan sosial, bantuan pemerintahan, hibah dan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i 	Sampai penetapan penerima bantuan	Berpotensi menimbulkan kerawanan dan persaingan di dalam masyarakat	Memuluskan perencanaan program yang dibuat oleh pemerintah
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN					
81	Biodata individu dan data keluarga :	<ul style="list-style-type: none"> - UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan - UU No. 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasi - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i 	atas ijin para pihak bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang

82	Usulan penangguhan pelaksanaan upah minimum dari dunia usaha kepada Gubernur	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf e	Sampai dengan ditetapkannya Keputusan oleh Gubernur	(1) Dapat mengikuti proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
83	Usulan penetapan Upah Minimum Bupati kepada Gubernur	- PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan - Permenakertrans No. 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf e	Sampai dengan ditetapkannya Upah Minimum oleh Gubernur	(1) Dapat mengikuti proses penyusunan kebijakan dan (2) Dapat mengungkap informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan/ atau tidak boleh diungkap	(1) Menjaga agar proses penyusunan kebijakan tidak terhambat dan (2) Menjaga informasi yang menurut UU lainnya dirahasiakan dan/atau tidak boleh diungkap
84	Nama dan alamat tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada perusahaan di Indonesia	- UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h,i dan j	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Bertentangan dengan privasi seseorang	Menjaga privasi seseorang
85	Proses penyusunan pertimbangan teknis kesesuaian status lahan	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf b,e dan i	Sampai dengan ditetapkannya pertimbangan teknis	Berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan berpeluang penyalahgunaan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
PENGAWASAN					
86	Hasil audit terkait dengan medical error	- Kemenkes No.496/Menkes/SK/IV/2005 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai audit diterima oleh yang berhak dan atas ijin penerima hasil audit	Mengganggu ketenteraman masyarakat yang terkait dengan bidang kesehatan	Menjaga ketenteraman masyarakat
87	Hasil monitoring adanya dugaan penyimpangan dan program bantuan kepada pemerintah desa/kelurahan dan kelompok masyarakat	- UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat [2] - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sampai selesainya monitoring dan upaya tindak lanjut dalam penanganan terhadap penyimpangan yang terjadi	Mengganggu rencana tindak lanjut pemerintah terutama dalam menangani macalahnya	Penanganan masalah lebih terfokus dan baik

88	Dokumen Hasil Pengawasan melalui (Waskat)	<ul style="list-style-type: none"> - Keptmenpan No. KEP/46/M.DAN/4/2004 tentang Petugas Pengelolaan Pengawasan Melalui dan Pengawasan Pemerintahan - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h,i dan j 	Atas ijin dan pihak yang menjadi subjek pengawasan	Mengganggu kebijakan lebih lanjut yang akan dilakukan	Kebijakan lebih lanjut akan lebih mudah dilaksanakan
89	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), termasuk pemeriksaan reguler,kasus,khusus,review laporan keuangan, evaluasi / pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j 	Tidak terbatas, kecuali atas ijin Bupati	Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan	Menjaga penyalahgunaan dari pihak yang tidak berkepentingan
90	Pendataan uji kompetensi pegawai	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP huruf h 	Tidak terbatas	Mengganggu akuntabilitas pelaksanaan ujian	Menjaga akuntabilitas dan menghindari kebocoran
91	Data hasil check up perorangan PNS/Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h 	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
92	Data hasil tes potensi/kompetensi PNS/ Pejabat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h 	Tidak terbatas	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
93	Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h 	Sampai ada putusan atas hasil pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
94	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h 	Atas ijin yang bersangkutan dan untuk kepentingan penegakan hukum	Mengganggu rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang
95	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan h 	setelah ada putusan atas hasil penanganan atau pemeriksaan	Mengganggu rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Menjaga rahasia pribadi seseorang
96	Data rencana penempatan/pemindahan PNS/CPNS	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a dan i 	Sampai selesaiya proses penempatan/pemindahan dari yang bersangkutan	Mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Menjaga kebijakan pemerintah supaya lebih tertib
97	Notulen hasil sidang Baperjakat	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h dan i 	Tidak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah

98	Dokumen pertimbangan/rekomendasi Baperjaket	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Mengganggu kebijakan pemerintah	Menjaga kebijakan pemerintah
99	Dokumen pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Mengganggu penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
100	Arsip SK pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU no. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Sesuai dengan ketentuan untuk tetap ditatausahaikan sampai 30 tahun	Perimbangan pertimbangan dapat mengungkap rahasia jabatan yang bersangkutan	Mengamankan kesinambungan dan kebijakan pemerintah
101	Soal Tes CPNS	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tak terbatas	Dapat mengganggu proses rekrutmen PNS dan merusak kerahasiaan seleksi	Menjaga akuntabilitas seleksi
102	Dokumen pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tak terbatas	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
103	SK pengangkatan, pemindahan guru PNS dalam tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah	- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Samipai yang bersangkutan ditugaskan dalam jabatan	Berpotensi menimbulkan intervensi terhadap kebijakan pimpinan	Kebijakan pimpinan dijauhkan dari intervensi oleh semua pihak
104	DP3/Penilaian prestasi kerja PN	- PP No. 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tak terbatas	Mengganggu privasi yang bersangkutan	Menjaga privasi yang bersangkutan
105	Berkas - berkas dan proses penanganan kasus pelanggaran disiplin PNS	- PP No. 53 Tahun 2010; - Perka BKN No. 21 Tahun 2010, Romawi IX Angka 8 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf a, h, dan i	Tak terbatas	Dapat berpotensi mengganggu obyektivitas putusan yang akan dijatuhi	Menjaga obyektivitas putusan

106	Keputusan ijin/keterangan tentang percercaian PNS	PP No.10 Tahun 1983 jo PP No.45 Tahun 1990 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Sampai keluarnya keputusan ijin	Berpotensi munculnya informasi yang tidak benar dan bisa menimbulkan fitnah	Menjaga obyektivitas putusan ijin
107	Dokumen pengelolaan kepegawaian : a. kenaikan pangkat b. kenaikan gaji berkala c. mutasi d. pensiun e. administrasi kepegawaian	UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) - PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersangkutan; mengganggu penyusunan kebijakan/menghambat kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
108	Biodata elektronik PNS lengkap	UU No.11 Tahun 2008 tentang ITE - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Data yang bersifat pribadi bila dibuka akan mengganggu privasi yang bersangkutan	Untuk menjaga kerahasiaan PNS yang bersangkutan
109	Data kepegawaian perorangan PNS lengkap	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
110	Arsip data perorangan PNS	- UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu privasi seseorang	Mengamankan hak privasi seseorang
111	Daftar usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengganggu kebijakan pemerintah/pimpinan	Mengamankan kebijakan pimpinan
112	Daftar pejabat yang akan dilantik	- PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	sampai dengan pelantikan jabatan	Mengganggu proses penyusunan kebijakan karena ada pengungkapan yang mendahului	Mengamankan proses penyusunan kebijakan
113	Daftar nominasi (rangking) Pejabat Struktural	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tidak terbatas	Menghambat proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses penilaian dan kebijakan yang akan diambil
114	Instrumen tes potensi/kompetensi PNS/Pejabat	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i	Tidak terbatas	Dapat menghambat proses penilaian	Mengamankan proses yang sedang berlangsung
115	Identifikasi hasil uji kompetensi PNS	- Keputusan Kepala BKN No. 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian PNS - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Dapat mengganggu rahasia pribadi PNS yang bersangkutan dan mengganggu proses kebijakan yang akan diambil	Mengamankan proses pengambilan kebijakan dan melindungi PNS yang bersangkutan

116	Data perorangan tenaga honorer/wiyata bakti pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja	- Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Menjaga rahasia pribadi seseorang dan berpotensi untuk disalahgunakan	Melindungi rahasia pribadi seseorang dan menghindari penyalahgunaan pihak - pihak yang tidak berkepentingan
	KEUANGAN				
117	Dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya	- UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan (2) - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf h, i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan
118	Database wajib pajak dan retribusi	- UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE pasal 40 - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j - UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 172	Tidak terbatas	Melanggar privasi wajib pajak/retribusi	Menjaga privasi wajib pajak/retribusi
119	Proses pengelolaan administrasi keuangan beserta pembukuan	- Permenagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Tidak sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan	Sesuai dengan asas petigoleaan administrasi keuangan
120	Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rincian 2.2.1	Permenagri tentang Pedoman Penyusunan APBD - Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Huruf i dan j	Tidak terbatas	Mengganggu kelancaran pelaksanaan program pemerintah	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan

BUPATI GROBOGAN,

SRI SUMARNI